



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN I
2020

Penyusun:

Penanggung Jawab: Ismed Saputra | Ketua Tim: Budi Marsudiyoto |
Editor: Arwin Fathurrahman | Desain Grafis: Eko Siyam Budiyanto
Anggota: Dagri Meifardo | Hermono | Yunisah | Rikki Okto Saputra |
Larashati Setyo Ningtyas

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Perkembangan dan Analisis Regional	1
A Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B Inflasi	2
C Indikator Kesejahteraan	3
Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	6
A Pendapatan Negara	7
B Belanja Negara	9
C Prognosis Realisasi APBN	11
Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	12
A Pendapatan Daerah	13
B Belanja Daerah	16
C Prognosis Realisasi APBD	18
Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)	19
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	19
B Pendapatan Konsolidasian	19
C Belanja Konsolidasian	21
D Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto....	22
Bab V Berita/Isu Fiskal Regional	24
A Kontribusi APBN dan Peran Dana Desa dalam Penanggulangan Covid-19.....	24



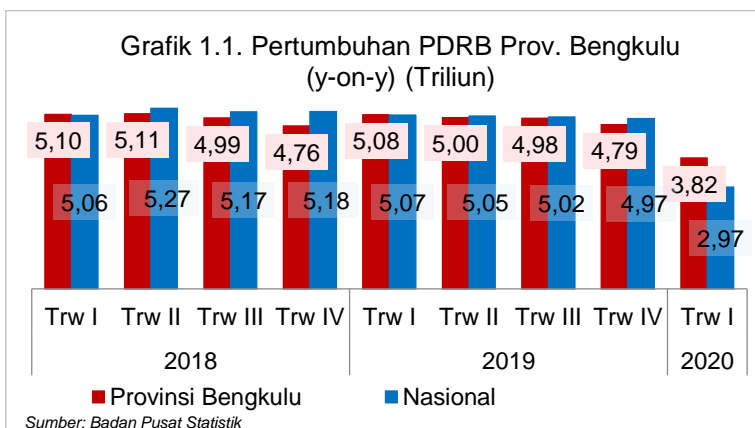
BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perekonomian Provinsi Bengkulu yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2020 tercatat sebesar Rp18,47 triliun. Sedangkan nilai riil PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp11,81 triliun. Laju pertumbuhan PDRB pada Triwulan I Tahun 2020 tumbuh 3,82 persen (*y-on-y*) mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada periode Triwulan I 2019 (5,08 persen). Secara nasional, pertumbuhan Provinsi Bengkulu tercatat lebih tinggi dari angka nasional (2,97 persen) dan berada di posisi ke-empat tertinggi laju rata-rata pertumbuhan regional Sumatera. Perekonomian global pada Triwulan I 2020 menunjukkan penurunan tajam sejak awal bulan Maret akibat meluasnya wabah COVID-19 yang memaksa penerapan kebijakan pembatasan aktifitas dan perjalanan berbagai negara yang berdampak pada turunnya aktifitas sektor jasa dan terjadi kontraksi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2020 terjadi kontraksi atau perlambatan pada hampir seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan yang positif tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang



Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 sebesar 3,82 persen, di Bengkulu lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional

dan jasa sebesar 10,70 persen, diikuti oleh komponen impor barang dan jasa sebesar 5,84 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,18 persen. Ekspor Barang dan jasa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bengkulu pada Triwulan I 2020 (*y-on-y*) disebabkan oleh peningkatan aktivitas bongkar muat barang perdagangan dalam negeri dan peningkatan nilai ekspor batu bara ke luar negeri.

Sementara dari sisi laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada Triwulan I (*y-on-y*) pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,66 persen. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,73 persen, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 8,76 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,39 persen. Peningkatan transaksi jasa keuangan akibat meningkatnya transaksi online dan digulirkannya sejumlah stimulus keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, BI dan OJK dalam rangka mitigasi dampak negatif pandemic COVID-19.

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2020 Provinsi Bengkulu mempunyai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,15 persen, sementara realisasi triwulan I sebesar 3,82 persen atau dibawah target. Artinya sampai dengan triwulan I masih dibawah target sebesar 1,33 persen.

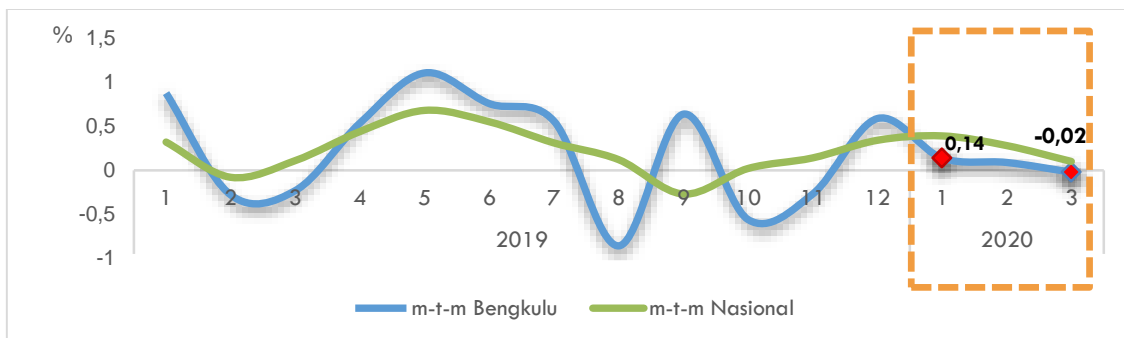
B. INFLASI

Laju Inflasi tahunan (*y-on-y*) pada Triwulan I 2020 sebesar 2,42 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang sebesar 2,96 persen. Sedangkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum berdasarkan tingkat inflasi tahun kalender (*y-t-d*) untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tercatat sebesar 0,21 persen. Angka ini masih berada di bawah inflasi nasional yaitu 0,76 persen.



Inflasi tahunan pada triwulan I 2020 di Bengkulu 2,42 persen, lebih rendah daripada rata-rata inflasi nasional

Grafik 1.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (*m-t-m*)



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Kenaikan harga secara umum pada bulan Januari 2020 tercatat sebesar 0,14 persen (berada di bawah inflasi nasional 0,39 persen). Inflasi ini disebabkan naiknya harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki 0,20 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan ini terutama disebabkan oleh naiknya harga cabai merah. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,93 persen yang dipengaruhi oleh turunnya tarif angkutan udara.

Harga pada bulan Februari 2020 tercatat mengalami inflasi sebesar sebesar 0,09 persen. Angka inflasi ini masih disebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,19 persen dan kelompok pakaian sebesar 0,02. Kenaikan harga komoditas bawang putih memberi andil terbesar pada inflasi bulan ini. Sedangkan pada bulan Maret 2020 tercatat terjadi deflasi sebesar -0,02 persen (sedangkan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,1 persen). Deflasi terutama disebabkan penurunan harga kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,26 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,55 persen. Deflasi yang terjadi pada bulan ini terutama disebabkan oleh antara lain turunnya harga tiket angkutan udara, daging ayam ras dan daging sapi.

Target Inflasi di Provinsi Bengkulu sesuai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2020 sebesar 3,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Bengkulu masih terjaga. Hal-hal yang menyebabkan inflasi di Bengkulu terutama permintaan atas bahan makanan.



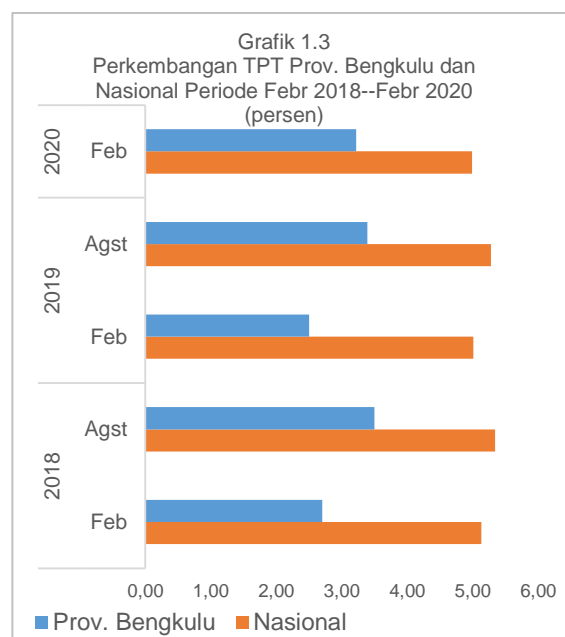
TPT Bengkulu 3,22 persen, lebih rendah daripada TPT Nasional sebesar 4,99 persen

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus melakukan langkah antisipatif dengan Strategi pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2020 untuk komoditas pangan berdasarkan strategi utama 4K yaitu: Ketersediaan pasokan; Keterjangkauan harga; Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam menjaga kestabilan harga komoditas bahan pokok masyarakat. Berbagai terobosan juga dapat dilakukan dengan peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka stabilitas harga pangan dan lebih melibatkan BUMDes dan BUMD.

C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

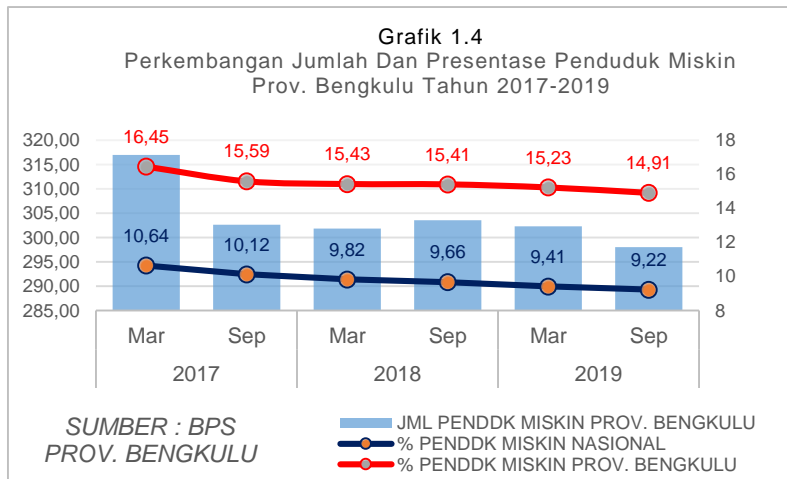
1. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 mencapai 3,22 persen, angka tersebut masih dibawah angka TPT Nasional (4,99 persen). Ini artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 3 sampai 4 orang pengangguran. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen dibandingkan Februari 2019. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih



didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat SD kebawah sebanyak 37,75 persen dan tamat SMP sebanyak 18,46 persen, selanjutnya tamatan SMA/SMK sebanyak 30,95 persen sedangkan yang berpendidikan tinggi lulusan Diploma dan Universitas hanya sebanyak 12,83 persen.

2. Tingkat Kemiskinan



Tingkat kemiskinan pada periode 2017-2019 di Provinsi Bengkulu menunjukkan trend menurun dari waktu ke waktu selama periode Maret 2017 sampai dengan September 2019. Apabila dibandingkan

antara periode September 2019 yang tingkat kemiskinannya sebesar 14,91 persen ke September 2018 yang tingkat kemiskinannya 15,41 persen, terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,50 persen. Pada periode September 2017 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 303,55 ribu jiwa (15,41 persen) terus menurun hingga menjadi 298,00 ribu jiwa (14,91 persen) di bulan September 2019.



Kemiskinan di Bengkulu menunjukkan tren menurun sejak 2017

Bila dibandingkan dengan nasional, kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tertinggal jauh. Pada September 2019 tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 14,91 persen, lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 9,22 persen. Namun angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu sejak 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan didorong atas pembangunan berbagai sektor seperti infrastruktur jalan dan jembatan sehingga memperlancar mobilitas masyarakat terutama distribusi hasil pertanian pedesaan.

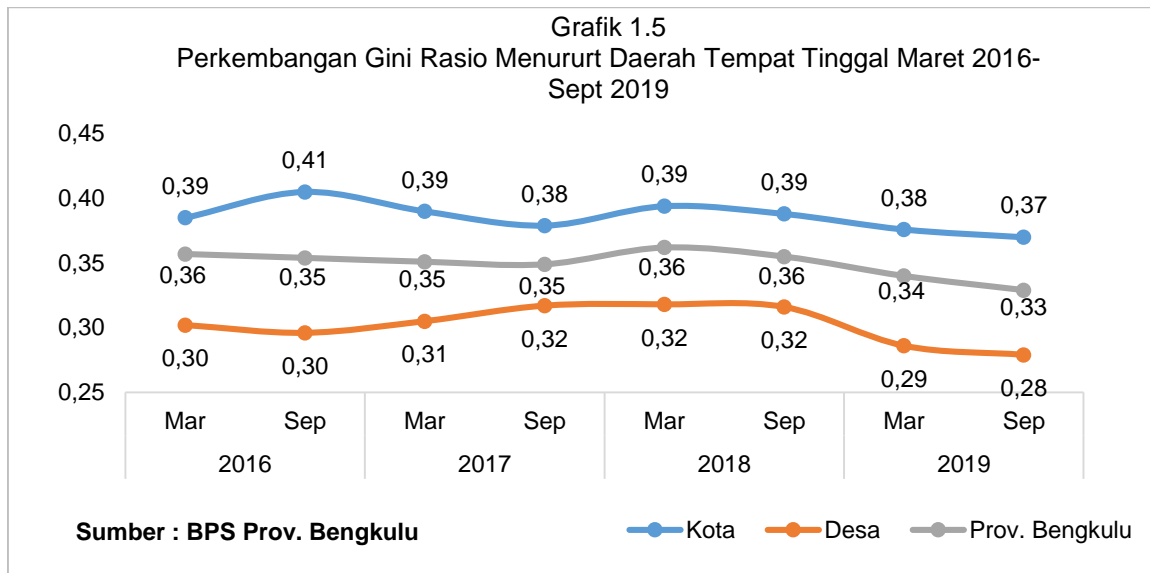
3. Gini Ratio

Gini Ratio Provinsi Bengkulu periode September 2019 tercatat 0,329 atau menurun 0,03 poin dibandingkan September 2018 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di wilayah Bengkulu lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional dan menempatkan

Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi ke-17 dari 34 di Indonesia. Fenomena tidak meratanya pengeluaran per kelompok penduduk pada daerah perkotaan dan perdesaan masih menjadi penyebab terjadinya ketimpangan.



Gini ratio tercatat 0,37, terendah sejak tahun 2016



Progress Perkembangan Indikator Makro Provinsi Bengkulu s.d Triwulan I 2020

Tabel 1.1 Realisasi Indikator Makro Provinsi Bengkulu dan Nasional s.d Triwulan I Tahun 2020

No	Indikator	Target (KUA Prov. Bengkulu TA 2020)	Realisasi Prov. Bengkulu	Realisasi Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,15%	3,82%	2,97%
2	Inflasi	3,35%	2,42% *	2,96% *
3	Kemiskinan	14,50%	14,91% **	9,22% **
4	Pengangguran (TPT)	3,00%	3,22%	4,99%

* (y-on-y)

** per Sept 2019

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam tiap-tiap indikator kesejahteraan yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemic corona sejak awal bulan Maret harus disikapi melalui kebijakan stimulus keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, BI dan OJK guna membantu masyarakat dan dunia usaha melewati masa sulit akibat dampak negative Covid-19.
2. Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi UMKM dengan mengembangkan potensi kekhasan daerah diantaranya kopi dan ekonomi kreatif rumah tangga lainnya.
3. Segera mempercepat realisasi dana APBN dan APBD utamanya belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti dana desa dan bantuan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Data Pelaksanaan APBN di Provinsi Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Miliar)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	2.574,36	423,34	2.636,43	409,21
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.574,36	423,34	2.636,43	409,21
1. Penerimaan Pajak	2.253,18	294,28	2.207,39	342,60
2. PNBPN	321,18	129,06	429,04	66,61
II. HIBAH	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	15.338,80	3.325,57	15.675,29	3.052,35
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	4.490,26	598,58	4.681,58	602,90
1. Belanja Pegawai	1.537,42	329,04	1.746,11	348,54
2. Belanja Barang	2.005,01	252,42	1.850,06	199,31
3. Belanja Modal	932,87	14,81	1.072,10	52,65
4. Belanja Bantuan Sosial	14,95	2,31	13,32	2,39
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	10.848,54	2.726,99	10.993,71	2.449,45
1. Transfer ke Daerah	9.769,12	2.533,28	9.894,20	2.410,09
a. Dana Perimbangan	9.722,93	2.510,19	9.734,44	2.410,09
1) Dana Alokasi Umum	6.681,81	2.202,13	6.765,44	2.146,64
2) Dana Bagi Hasil	381,23	53,19	273,99	35,38
3) Dana Alokasi Khusus	2.659,90	254,88	2.695,00	228,07
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	46,18	23,09	159,76	0,00
2. Dana Desa	1079,42	193,71	1099,51	39,36
C. SURPLUS DEFISIT	-12.764,44	-2.902,23	-13.038,86	-2.643,14

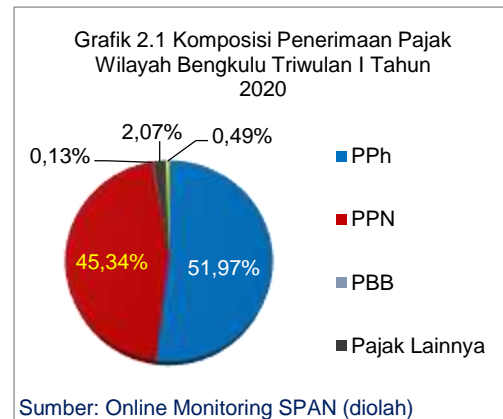
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi pendapatan Negara di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp409,21 miliar turun 3,34 persen dibanding periode yang sama Tahun 2019 dengan realisasi Rp423,34 miliar. Realisasi belanja Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp3.052,35 miliar turun 8,26 persen dibandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2019 dengan realisasi Rp3.326,57 miliar.

A. PENDAPATAN NEGARA

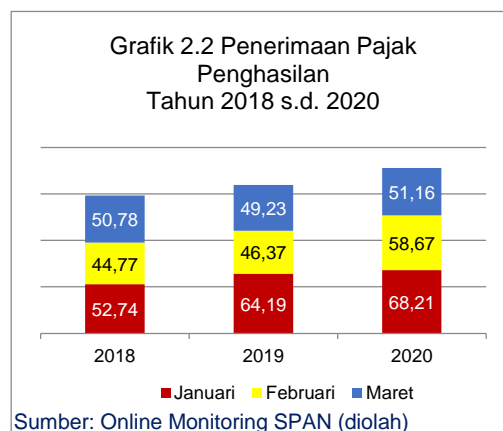
1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp342,60 miliar, tumbuh sebesar 16,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp294,28 miliar. Pertumbuhan penerimaan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



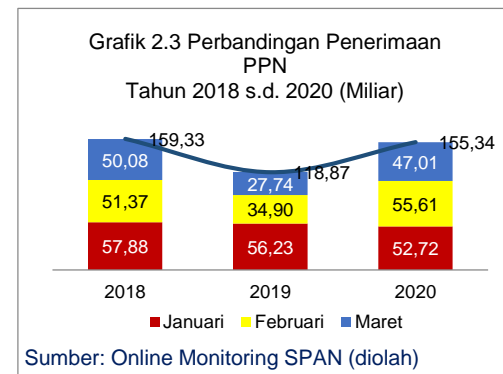
a) Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi penerimaan PPh Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp159,79 miliar tumbuh 11,42 persen atau sebesar 18,25 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Pajak Penghasilan menjadi kontributor terbesar dari penerimaan perpajakan dengan kontribusi 51,97 persen dari total penerimaan pajak. PPh Pasal 21 menjadi penyumbang terbesar realisasi pajak penghasilan dengan realisasi sebesar Rp74,49 miliar.



b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

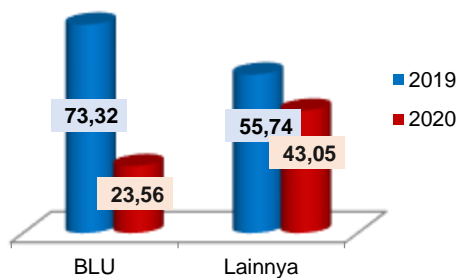
Realisasi PPN pada Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp155,34 miliar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 30,68 persen dibanding Triwulan I Tahun 2019 yang mencatat realisasi sebesar Rp118,87 miliar.



2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebesar 66,61 miliar mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan dengan periode akhir Triwulan I Tahun 2019, dimana realisasi PNBP mencapai Rp Rp129,06 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi penerimaan baik dari PNBP lainnya maupun PNBP BLU. Tingkat realisasi PNBP BLU hanya sebesar Rp23,56 miliar tumbuh negatif sebesar -67,87 persen yang disebabkan oleh Universitas Bengkulu baru melakukan pengesahan atas

Grafik 2.5 Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2019 s.d. 2020



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

pendapatan jasa pelayanan pendidikan pada Bulan April Tahun 2020. Selain itu pencabutan status BLU pada Satker Bandar Udara Fatmawati menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi penerimaan BLU.

Sektor penyumbang Realisasi PNBP terbesar di Provinsi Bengkulu berasal dari sektor pendidikan. Penerimaan Triwulan I

Tahun 2020 yang terbesar disumbangkan dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp16,91 miliar dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dengan pendapatan sebesar Rp11,02 miliar. Secara total kedua penerimaan tersebut berkontribusi sebesar 41,92 persen dari total pendapatan PNBP.

a) Pendapatan Biaya Pendidikan

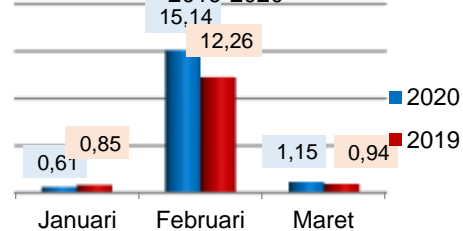
Pendapatan biaya pendidikan mengalami pertumbuhan sebesar 20,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pendapatan biaya pendidikan disumbangkan oleh IAIN Bengkulu sebesar Rp12,82 miliar dan IAIN Curup sebesar Rp4,09 miliar. IAIN Bengkulu memiliki potensi untuk menjadi

Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Berdasarkan realisasi penerimaan, IAIN Bengkulu mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh Politeknik Kesehatan Bengkulu selaku Perguruan Tinggi BLU.

b) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

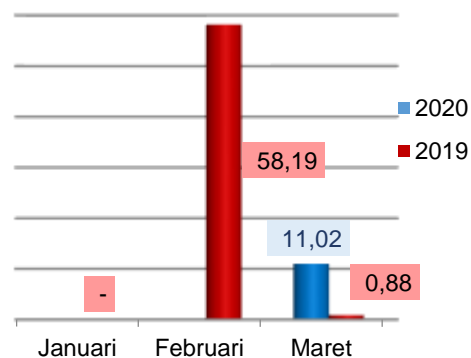
Pada Triwulan I Tahun 2019, Pendapatan jasa pelayanan pendidikan menjadi penyumbang PNBP terbesar di Provinsi Bengkulu dengan realisasi Rp59,07 miliar. Sedangkan Triwulan I Tahun 2020 Realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan turun menjadi Rp11,02 miliar diakibatkan belum adanya penerimaan dari Universitas Bengkulu yang baru mengesahkan penerimaan yang diterimanya pada Bulan April 2020 sebesar Rp62,34 miliar.

Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Biaya Pendidikan Triwulan I Tahun 2019-2020



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Grafik 2.7 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Triwulan I Tahun 2019-2020



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

B. BELANJA NEGARA

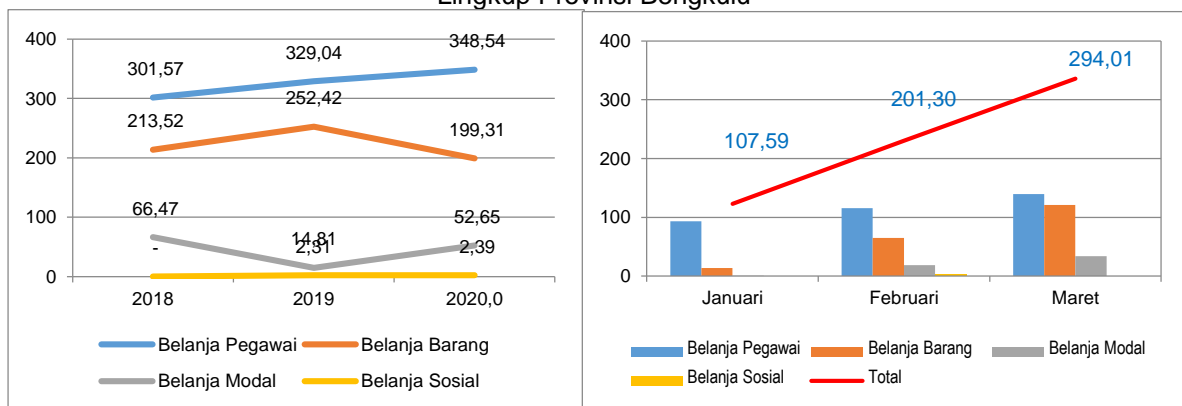
Alokasi belanja negara pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15.675,29 miliar. Sebagian besar dari Belanja Negara tersebut yaitu sebesar Rp10.993,71 miliar atau 70,13 persen dari total Belanja Negara berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4.681,58 miliar atau sebesar 29,87 persen dari total Belanja Negara.

Sebesar 70,33 persen belanja Negara merupakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat Triwulan I Tahun 2020 mengalami pertumbuhan dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2019. Realisasi Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp602,90 miliar naik sebesar 4,32 miliar dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp598,58.

Grafik 2.8 Tren Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Bengkulu



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Sosial menunjukkan tren realisasi yang terus meningkat dari Tahun 2018 hingga 2020. Sementara itu, Belanja Barang dan Belanja modal menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Triwulan I Tahun 2020 realisasi anggaran terbesar berasal dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp348,54 miliar bila dibanding tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan sebesar 5,93 persen.

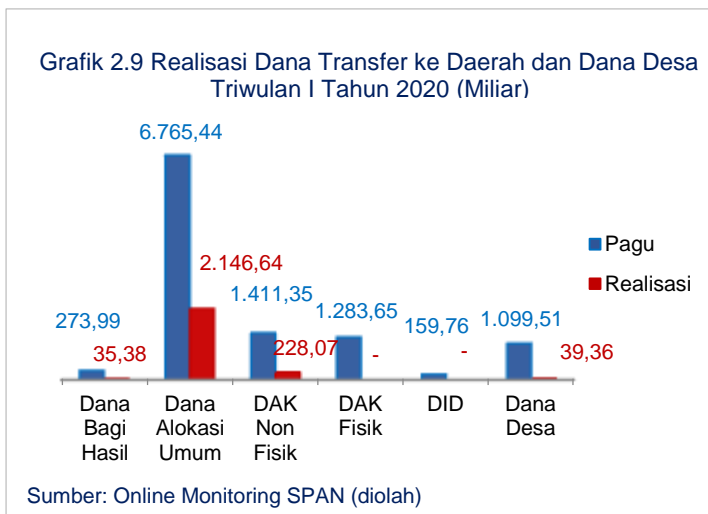
Sejak 2018 realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial terus meningkat, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Barang berfluktuasi

Sementara itu, realisasi Belanja Barang mengalami kontraksi di Tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, dari 252,42 miliar pada Tahun 2019 menjadi Rp199,31 miliar pada Tahun 2020 (terkontraksi sebesar 21,04 persen). Penurunan realisasi belanja barang selama Triwulan I Tahun 2020 disebabkan oleh adanya pembatasan realisasi terkait belanja barang dalam mengantisipasi pandemi Wabah Covid-19.

Realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial meningkat dibanding Triwulan I Tahun 2019. Realisasi Belanja modal meningkat sebesar 255 persen dari 14,81 miliar di Tahun 2019 menjadi 52,65 miliar di Tahun 2020. Belanja bantuan sosial meningkat tipis dari

2,31 miliar menjadi 2,39 miliar pada Tahun 2020. Bila dilihat tren per bulan selama tahun 2020 realisasi semua jenis belanja memiliki tren meningkat dari bulan ke bulan. Pada Bulan April 2020 Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait *refocussing* dan realokasi anggaran APBN untuk menangani wabah pandemic Covid-19. Dengan adanya aturan tersebut, realisasi belanja modal selama tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19 baik berupa penyediaan perlengkapan kesehatan maupun untuk kegiatan jaring pengaman sosial.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa



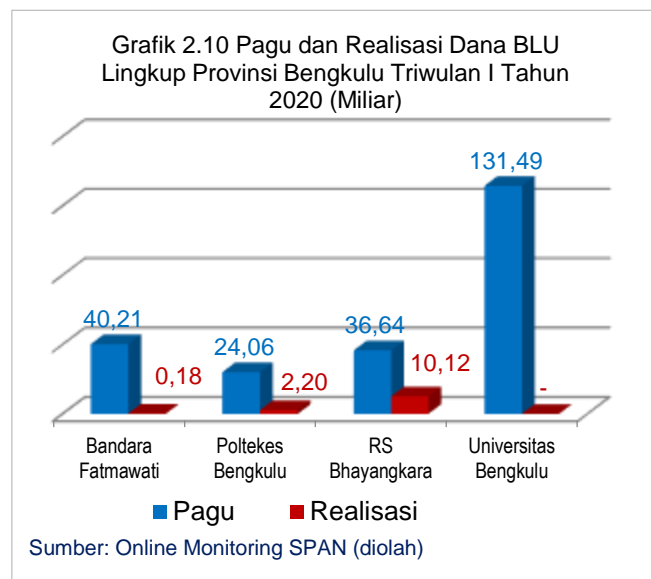
Realisasi TKDD Provinsi Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp2.449,45 miliar. Pada Triwulan I Tahun 2020 penyaluran terbesar berasal dari realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.146,64 miliar, diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp228,07 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar

Rp35,38 miliar, dan Dana Desa sebesar 39,36 miliar. Sementara itu, untuk untuk DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah, selama Triwulan I 2020 belum ada realisasi yang terjadi.

3. Pengelolaan BLU

Di wilayah Bengkulu terdapat 4 satker BLU, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu BLU dari keempat satker tersebut adalah sebesar Rp232,41 miliar. Sedangkan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp12,50 miliar.

Pada tanggal 5 Maret 2020 telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2020 yang berisi tentang



pencabutan status BLU pada Bandar Udara Fatmawati dan dalam waktu 6 bulan akan dilakukan proses transisi kepengurusan likuidasi BLU tersebut. Dengan pencabutan status BLU tersebut, pagu BLU Bandar Udara Fatmawati tidak dapat dilakukan realisasi lagi dan akan dilakukan revisi penghapusan Pagu yang bersumber dari BLU.

4. Manajemen Investasi Pusat

Data Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2020 per Bank/Penyalur lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penyaluran KUR per Bank/Penyalur Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan I Tahun 2020 (Rupiah)

NO	NAMA BANK	DEBITUR	NILAI PENYALURAN	OUTSTANDING
1	Bank Rakyat Indonesia	12.281	394.566.225.000	369.595.554.988
2	Bank Mandiri	1.130	113.256.000.000	109.746.000.000
3	Bank Sinarmas	118	36.287.000.000	17.922.380.861
4	Bank Negara Indonesia	100	26.808.610.804	26.082.000.383
5	BRI Syariah	242	23.545.000.000	22.432.744.959
6	BPD Bengkulu	78	12.454.000.000	6.280.376.462
7	Lain-Lain	10	1.046.220.000	1.021.240.913
8	SIKP UMi	104	403.500.000	
Total		14.063	608.366.555.804	553.080.298.566

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

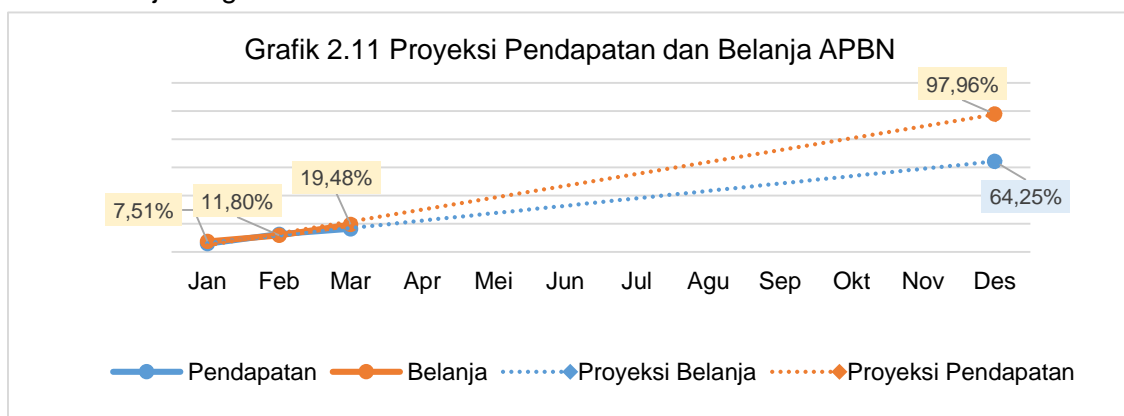
Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2020, KUR yang telah tersalur di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp608,36 miliar rupiah, yang disalurkan kepada 14.063 debitur. Sebagian besar disalurkan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp394,57 miliar kepada 12.281 debitur.

C. PROGNOSIS REALISASI APBN

Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun 2020 dalam lingkup Provinsi Bengkulu dengan mempertimbangkan kebijakan stimulus fiskal dan relaksasi yang diterapkan dalam menghadapi wabah pandemic Covid-19 diperkirakan hanya mencapai 64,25 persen untuk pendapatan Negara dan 95 persen untuk belanja Negara.



APBN diproyeksikan defisit sebesar 33,71 persen pada akhir tahun 2020





BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Wilayah Bengkulu terdiri atas sebelas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Miliar)

Uraian	2019		2020		Pertumbuhan	Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
Pendapatan	13.148,05	2.807,19	13.461,45	2.524,84	-10,06%	18,76%
PAD	1.942,21	209,51	1.966,90	229,68	9,63%	11,68%
Pendapatan Pajak Daerah	1.039,38	161,66	1.164,50	167,01	3,31%	14,34%
Pendapatan Retribusi	48,64	6,58	47,24	5,96	-9,51%	12,61%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	58,15	0,60	39,25	0,90	50,00%	2,29%
Lain-Lain PAD yang sah	796,04	40,67	715,90	55,82	37,25%	7,80%
Pendapatan Transfer	11.075,97	2.597,40	11.334,89	2.294,88	-11,65%	20,25%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	9.668,18	2.416,27	9.756,86	2.284,91	-5,44%	23,42%
Dana Bagi Hasil Pajak	320,69	50,61	270,42	35,36	-30,13%	13,08%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	6.666,97	2.117,04	6.769,47	2.146,64	1,40%	31,71%
Dana Alokasi Khusus	2.680,52	248,62	2.716,97	102,91	-58,61%	3,79%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.118,68	168,88	1.242,50	-	-100,00%	0,00%
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	1.118,68	168,88	1.242,50	-	-100,00%	0,00%
Transfer Pemerintah Provinsi	279,11	12,25	335,54	9,97	-18,60%	2,97%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	279,11	12,25	335,54	9,97	-18,60%	2,97%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	10,00	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov/Kab/Kota Lainnya	10,00	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	129,87	0,28	159,65	0,28	0,00%	0,17%
Pendapatan Hibah	128,81	0,09	148,61	-	-100,00%	0,00%
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
pendapatan Lainnya	1,07	0,19	11,04	0,28	50,00%	2,53%
Jumlah Pendapatan	13.148,05	2.807,19	13.461,45	2.524,84	-10,06%	18,76%
Belanja	12.076,01	1.101,37	12.211,35	1.500,03	36,20%	12,28%
Belanja Pegawai	5.361,52	865,54	5.351,71	979,78	13,20%	18,31%
Belanja Barang	3.064,38	185,47	3.147,17	224,98	21,30%	7,15%
Belanja Bunga	4,00	-	0,93	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	476,37	21,00	934,17	187,88	794,84%	20,11%
Belanja Sosial	16,43	0,29	11,04	1,37	381,81%	12,45%
Belanja Bantuan Keuangan	20,50	-	3,29	-	-	0,00%
Belanja Modal	3.115,81	29,06	2.744,20	104,79	260,61%	3,82%
Belanja Tak Terduga	17,00	0,02	18,85	1,23	7522,72%	6,51%
Transfer Pemerintah Daerah	1.866,51	71,12	1.932,62	40,27	-43,39%	2,08%
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	261,18	16,38	307,88	10,28	-37,26%	3,34%
Transfer bagi Hasil Pajak Daerah	261,18	16,38	307,88	10,28	-37,26%	3,34%
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer bantuan Keuangan	1.605,32	54,74	1.624,74	29,99	-45,22%	1,85%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer bantuan Keuangan ke Desa	1.605,32	54,74	1.624,74	29,99	-45,22%	1,85%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	13.942,52	1.172,49	14.143,97	1.540,29	31,37%	10,89%
Surplus/Defisit	(794,47)	1.634,69	(682,53)	984,55	-39,77%	-144,25%

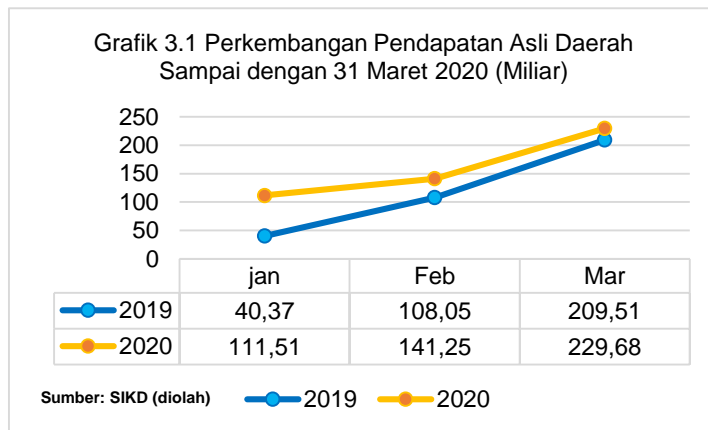
Sumber: SIKD (diolah)

Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 mencapai Rp2,52 triliun, turun 10,06 persen dari triwulan I 2019 yang sebesar Rp2,80 triliun. Turunnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang mampu tumbuh 9,63 Persen dan pendapatan transfer yang mengalami penurunan 11,65 persen.

Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1,54 triliun tumbuh 31,37 persen dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang sebesar Rp1,17 triliun. Kenaikan realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh Belanja Daerah yang meningkat 36,20 persen dan Transfer Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan 43,39 persen.

A. PENDAPATAN DAERAH

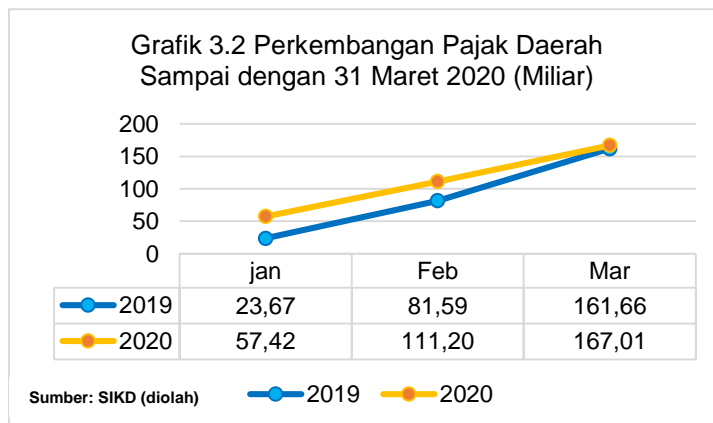
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Secara agregat PAD Pemda lingkup Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp229,68 miliar atau 11,68 persen dari pagu. Realisasi ini mengalami peningkatan 9,63 persen dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar Rp209,51 miliar.

Realisasi PAD dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang mampu tumbuh 3,31 persen, Hasil Kakayaan Daerah yang dipisahkan tumbuh 50 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang tumbuh 37,25. Sementara retribusi daerah yang mengalami penurunan 9,51 persen.

a. Penerimaan Pajak Daerah



Agregat penerimaan pajak daerah seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp167,01 miliar atau 14,34 persen dari pagu, tumbuh 3,31 persen apabila dibandingkan dengan triwulan I 2019. Pajak



Realisasi Pendapatan turun 10,06 persen. Belanja Tumbuh 36,20 persen



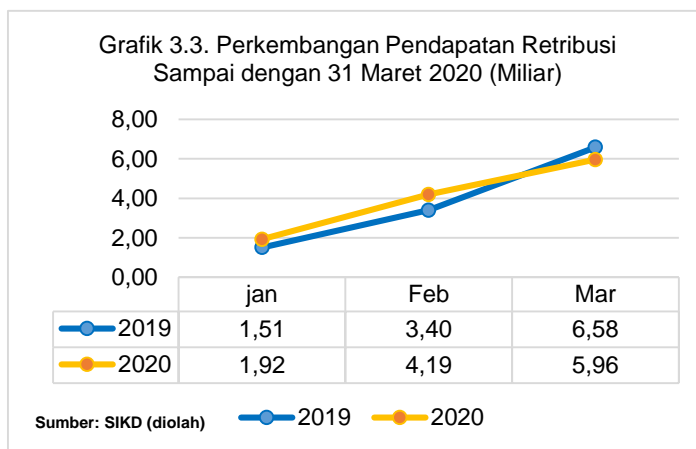
Realisasi PAD tumbuh 9,63 persen



Realisasi Pajak Daerah tumbuh 3,31 persen.

Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, menjadi sumber peningkatan pendapatan pada triwulan I tahun 2020. Kenaikan pajak hotel berasal dari pajak Hotel Bintang 3 dan 4. Meningkatnya pajak hotel juga berbanding lurus dengan kenaikan Pajak restoran. Peningkatan pajak hotel disebabkan oleh adanya percepatan kegiatan dari pemerintah daerah yang dilakukan pada awal tahun. Selain itu pajak restoran mengalami kenaikan juga disebabkan adanya usaha pemerintah Kota Bengkulu melakukan ekstensifikasi pajak kepada restoran-restoran yang belum dikenakan pajak di wilayah Kota Bengkulu.

Penerimaan Retribusi Daerah

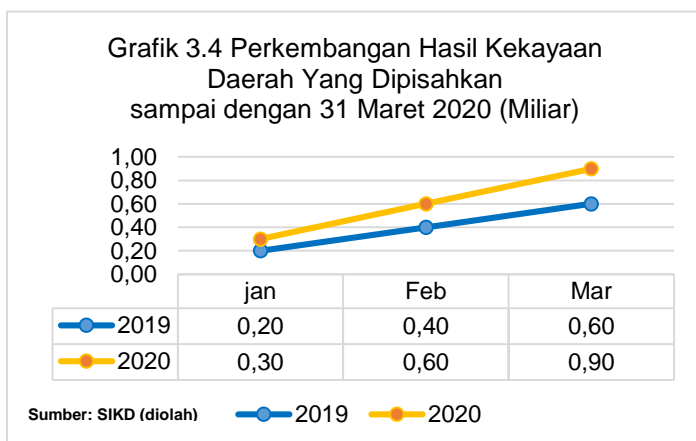


Agregat penerimaan retribusi seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I 2020 sebesar Rp5,96 miliar atau 12,61 persen dari pagu, mengalami penurunan 9,51 persen apabila dibandingkan dengan triwulan I 2019. Secara agregat, retribusi jasa umum

Realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan 9,51 persen

(Retribusi sewa tanah dan bangunan, retribusi pelayanan puskesmas, dan retribusi perpajakan tepi jalan), menjadi penyumbang penurunan retribusi pada triwulan I tahun 2020.

b. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

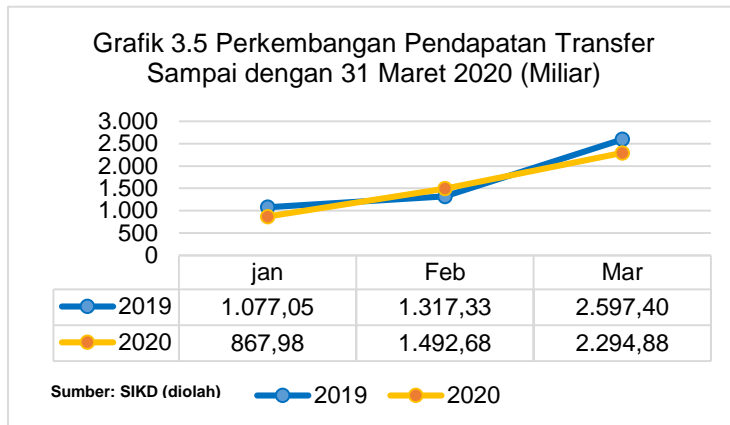


Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp900 juta atau 2,29 persen dari pagu, mampu tumbuh 50 persen dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar Rp600 juta. Peningkatan hasil kekayaan

Realisasi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh 50,00 persen

dipisahkan ini dikarenakan penerimaan Dividen dari Bank Bengkulu yang mengalami peningkatan.

2. Pendapatan Transfer



Total pendapatan transfer pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp2,29 triliun atau 20,25 persen dari pagu. Pendapatan Transfer ini mengalami penurunan 11,65 persen dibanding Triwulan I

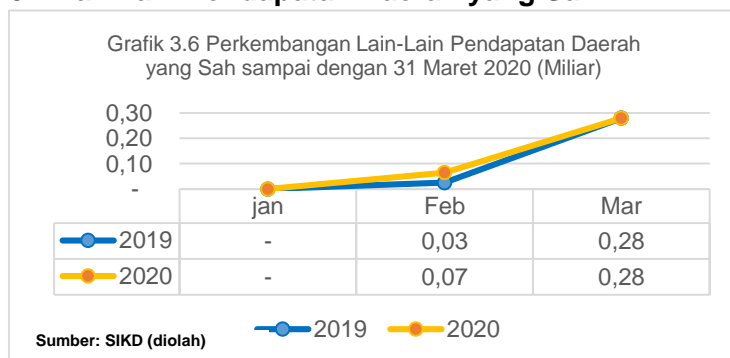
2019. Pendapatan transfer disumbangkan oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp2,28 triliun mengalami penurunan 5,44 persen, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp0 mengalami penurunan 100 persen, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp9,97 miliar atau mengalami penurunan 18,60 persen.

Penurunan pendapatan transfer disebabkan oleh adanya Penurunan Dana Bagi Hasil yang mencapai 30,13 yang disebabkan penurunan harga komoditas khususnya batubara. Selain itu Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa yang sampai dengan triwulan I 2020 yang masih nihil ikut andil dalam penurunan pendapatan transfer.



Realisasi Pendapatan Transfer mengalami penurunan 11,65 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



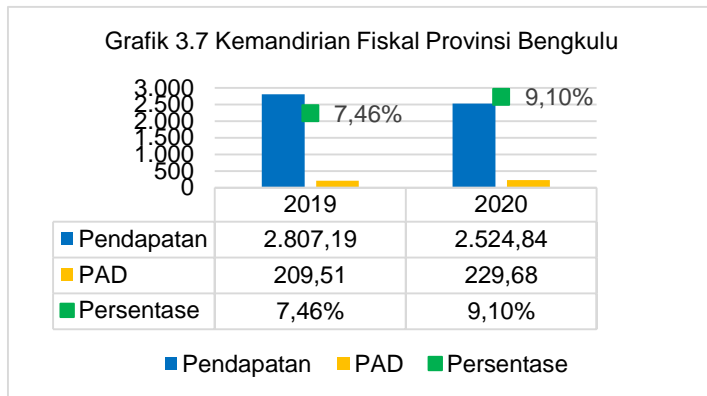
Secara agregat, realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I 2020 sebesar Rp280 juta, realisasi ini sama dengan realisasi triwulan I

2019. Pendapatan ini berasal dari jasa giro dan pendapatan hibah.

Kemandirian fiskal tercermin dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Pemda di Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar 9,10 Persen atau tumbuh dari triwulan I 2019 yang sebesar 7,46 Persen. Rendahnya PAD dikarenakan Pemda di Bengkulu belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD-nya. Kekayaan yang



Bengkulu masih sangat tergantung dengan Dana Transfer



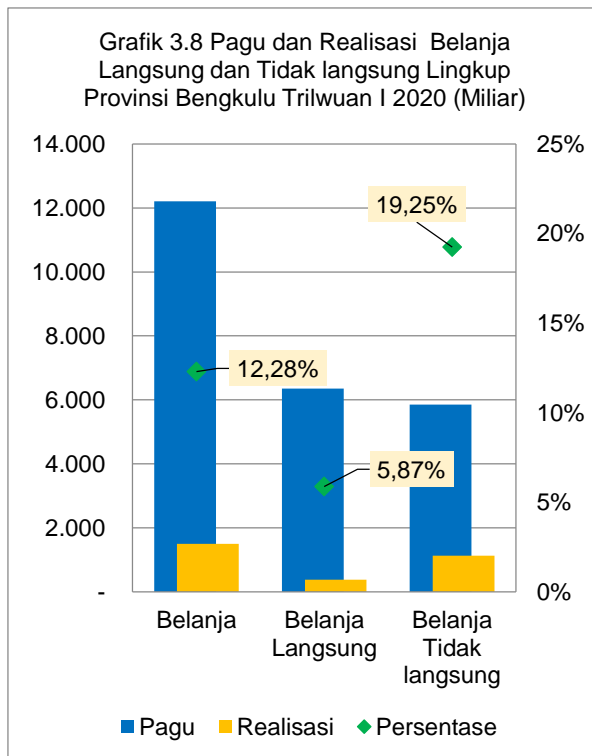
Sumber: SIKD (diolah)

Terkait dengan Pendapatan daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan realokasi dan refocussing APBD untuk menghindari penundaan transfer DAU dan/atau DBH.
2. Pemda perlu mengembangkan sektor pariwisata dengan harapan PAD dapat tumbuh signifikan melalui efek multiplier dari pajak hotel, restoran dan retribusi pada sektor pariwisata.
3. Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran.

B. BELANJA DAERAH

1. Belanja Langsung dan Tidak Langsung



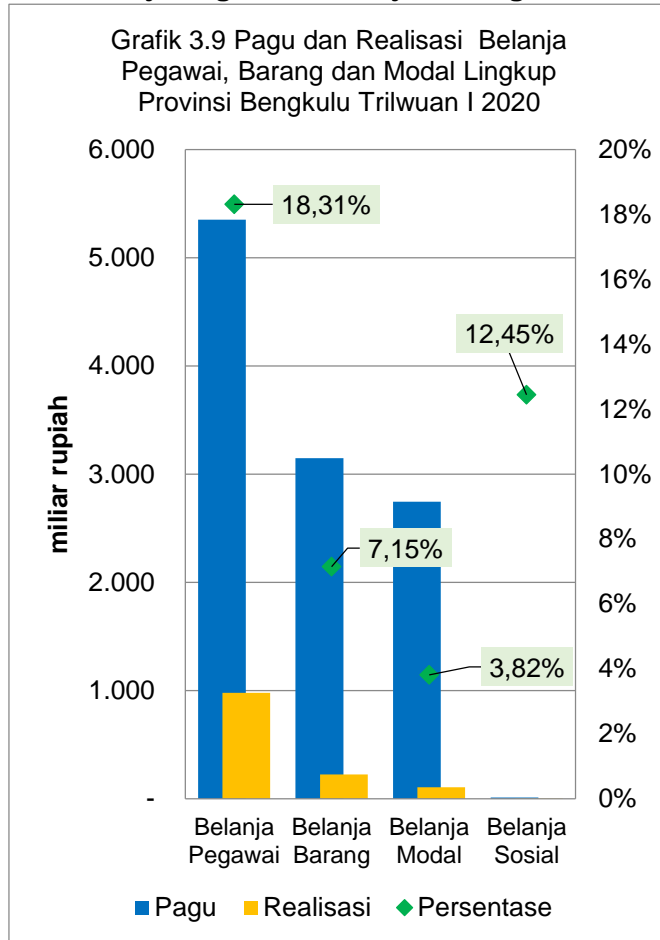
Realisasi total Belanja pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1,50 triliun atau 12,28 Persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp373,01 miliar atau 5,87 Persen dari pagu dan Belanja tidak langsung sebesar Rp1,12 triliun atau 19,25 Persen dari pagu. Dengan melihat realisasi tersebut, belanja tidak langsung lebih dominan daripada belanja langsung. Dominannya belanja tidak langsung disebabkan karena belanja digunakan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor. Sedangkan



Belanja Tidak Langsung mendominasi keseluruhan Belanja Daerah

realisasi belanja langsung masih rendah karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk belanja modal.

2. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal



Sumber: SIKD (dolah)

Realisasi Belanja pegawai pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 sebesar Rp979,78 miliar atau 18,31 persen dari pagu. Realisasi ini meningkat 13,20 Persen dari triwulan I 2019. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp224,98 miliar atau 7,15 Persen dari pagu. Realisasi ini meningkat 21,30 Persen dari triwulan I 2019. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp104,79 miliar atau 3,82 Persen dari pagu. Realisasi ini meningkat 260,61 Persen dari triwulan I 2019.

Meningkatnya Belanja Pegawai disumbang oleh kenaikan gaji pokok akibat penerimaan pegawai baru. Meningkatnya Belanja

Barang dikarenakan dampak dari persiapan pelaksanaan pilkada yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Sementara itu, naiknya Belanja Modal dipengaruhi oleh pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat dari tahun sebelumnya terutama di Kabupaten Lebong, Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.

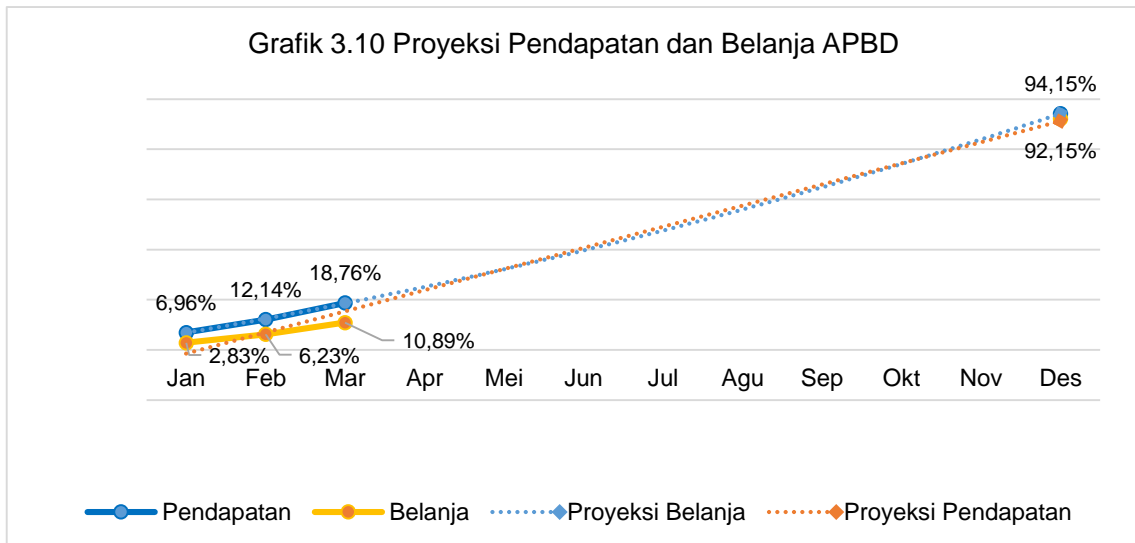
Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan realokasi dan refocussing APBD akibat dari Covid-19
2. Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan Covid-19 segera dilakukan
3. Mendorong desa melakukan percepatan proses Penetapan Perkades BLT agar dana desa cepat segera disalurkan.
4. Bupati agar melakukan rapat TEPR, untuk memonitor secara langsung jalannya APBD



Penyerapan Belanja Barang dan Belanja Modal masih rendah

C. PROGNOISIS REALISASI APBD



Berdasarkan metode *trend analysis*, secara agregat realisasi pendapatan APBD seluruh pemda di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir 2020 diperkirakan sebesar Rp12.673,95 miliar atau 94,15% dari target. Hal yang diperkirakan tidak mencapai target adalah PAD dan dana transfer.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020 (Miliar)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d TW I		Perkiraan Realisasi s.d TW I	
		Rp	% thd Pagu	Rp	% thd Pagu
Pendapatan Daerah	13.461,45	2.524,84	18,76%	12.673,95	94,15%
Belanja Daerah	14.143,97	1.540,29	10,89%	13.033,67	92,15%
Surplus/(defisit)	-682,53	984,55		-359,72	

Akhir Tahun 2020 APBD Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Bengkulu diperkirakan defisit Rp359,72 Miliar.

Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp13.033,67 miliar atau 92,15% dari pagu. Penghematan alamiah dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa akibat pandemi Covid-19 menyebabkan belanja modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2020 akan terjadi defisit sebesar Rp359,72 miliar.



BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I 2020 sebesar Rp484,61 miliar turun 3,76 persen dibandingkan triwulan I 2019 sebesar Rp503,54 miliar, sementara Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2020 sebesar Rp2,14 triliun tumbuh 21,01 persen dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar Rp1,77 triliun. Turunnya pendapatan pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh turunnya Pendapatan bukan pajak sebesar 26,84 persen. Sementara pendapatan pajak mampu tumbuh sebesar 11,77 persen. Tumbuhnya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh meningkatnya Belanja Pemerintah sebesar 23,71 persen sementara belanja transfer mengalami penurunan 43,39 Persen.

Pendapatan Konsolidasian menurun 3,76 persen.

Belanja Konsolidasian meningkat 21,01 persen

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2020 (Miliar)

Uraian	2020		Kenaikan/ Penurunan	2019	
	Pusat	Daerah			Konsolidasi
Pendapatan Negara	409,21	2.524,84	484,61	-3,76%	503,54
Pendapatan Perpajakan	342,60	167,01	509,61	11,77%	455,94
Pendapatan Bukan Pajak	66,61	62,95	129,57	-26,84%	177,10
Hibah	-	-	-	-100,00%	0,09
Transfer	-	2.294,88	(154,57)	19,27%	(129,59)
Belanja Negara	3.052,35	1.540,29	2.143,20	21,01%	1.771,07
Belanja Pemerintah	602,90	1.500,03	2.102,93	23,71%	1.699,95
Transfer	2.449,45	40,27	40,27	-43,39%	71,12
Surplus/(defisit)	(2.643,14)	984,55	(1.658,59)	30,85%	(1.267,53)
Pembiayaan		(2,00)	(2,00)	-74,51%	(7,85)
Penerimaan Pembiayaan Daerah		-	-		-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		2,00	2,00	-74,51%	7,85
Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran	(2.643,14)	982,55	(1.660,59)	30,20%	(1.275,38)

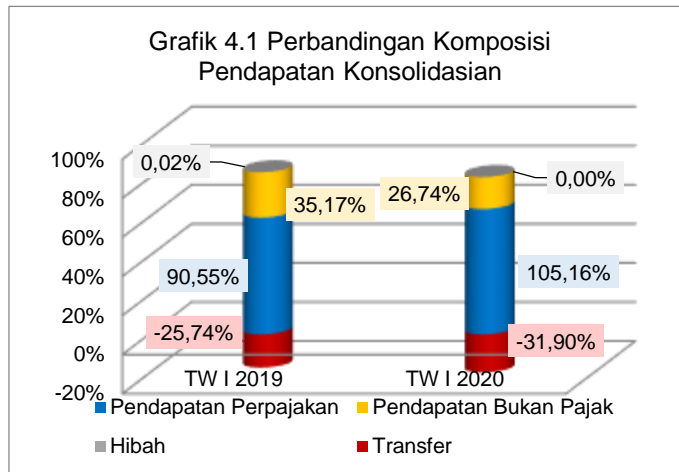
Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu

Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan I 2020 sebesar Rp2.449,45 miliar

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Dalam pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 14,61 persen dari 90,55 persen pada triwulan I 2019 menjadi 105,16 persen pada triwulan I 2020. Peningkatan porsi pendapatan pajak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak yang lebih besar daripada pendapatan bukan pajak.

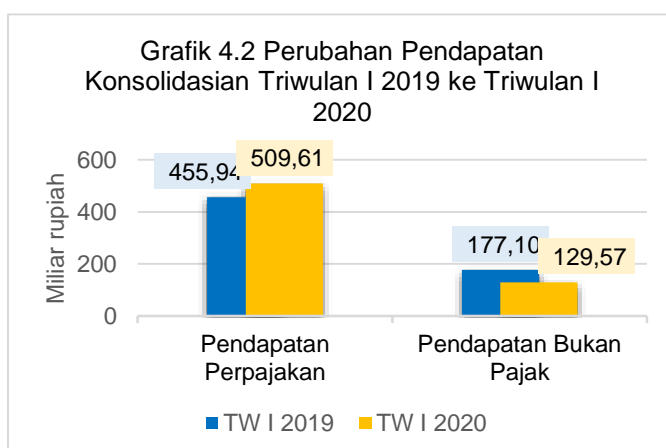


Sementara Porsi pendapatan bukan pajak mengalami penurunan sebesar 8,43 persen dari 35,17 persen pada triwulan I 2019 menjadi 26,74 persen pada triwulan I 2020. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya PNPB lebih rendah dari meningkatnya pendapatan pajak.

Pendapatan Pajak tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan bukan Pajak

Porsi Pendapatan Perpajakan yang mampu meningkat tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Bengkulu lebih baik. Diharapkan dengan naiknya porsi pendapatan perpajakan ini mampu meningkatkan kemandirian fiskal di Provinsi Bengkulu.

2. Analisis Perubahan



Pendapatan perpajakan pada triwulan I tahun 2020 sebesar 509,61 miliar tumbuh 11,77 Persen dibandingkan dengan triwulan I 2019. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya pajak pusat terutama PPN yang naik 30,69 persen dan PPh yang naik 16,42 persen. Sedangkan

Pendapatan Perpajakan mengalami peningkatan sedangkan Pendapatan Bukan Pajak mengalami penurunan

Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian mengalami penurunan 26,84 persen dipengaruhi oleh turunnya PNPB pusat yang mencapai 48,39 persen, yang disebabkan oleh turunnya Pendapatan BLU yang mencapai 67,86 persen.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Menurut BPS Provinsi Bengkulu, porsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 17,21 Persen. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Bengkulu masih tergantung dari APBN dan APBD yang digunakan untuk memberikan efek multiplier dalam menggerakkan perekonomian.

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi Triwulan I 2019	Realisasi Triwulan I 2020	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	455,94	509,61	11,77%
PNBP	177,10	129,57	-26,84%
Total	633,04	639,17	0,97%
PDRB/Pert Ekonomi	17.513,97	18.466,48	3,82%

sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan BPS

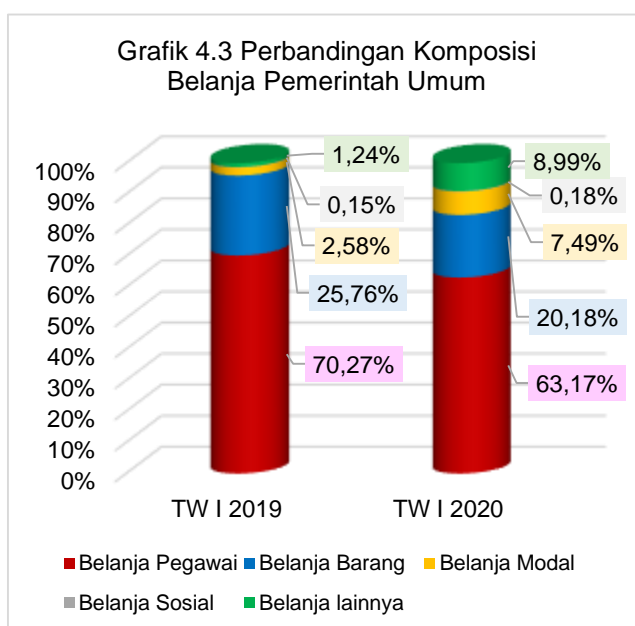
Triwulan I 2020 Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu sebesar 3,82 persen. Data tersebut berbanding lurus terhadap Penerimaan pendapatan konsolidasian yang pada triwulan I 2020 mampu tumbuh 0,97 persen dibandingkan dengan triwulan I 2019. Potensi pendapatan masih dapat ditingkatkan apabila perekonomian Bengkulu lebih baik. Untuk itu penggunaan APBD dan APBN yang dapat memberikan efek multiplier langsung terhadap perekonomian perlu dilakukan secara efektif, yaitu dengan belanja APBD dan APBN lebih fokus kepada penanganan Covid-19 dan selanjutnya kepada bidang yang mempunyai *share* terbesar yaitu bidang pertanian dan pariwisata.



Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan kenaikan/ penurunan pendapatan

BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



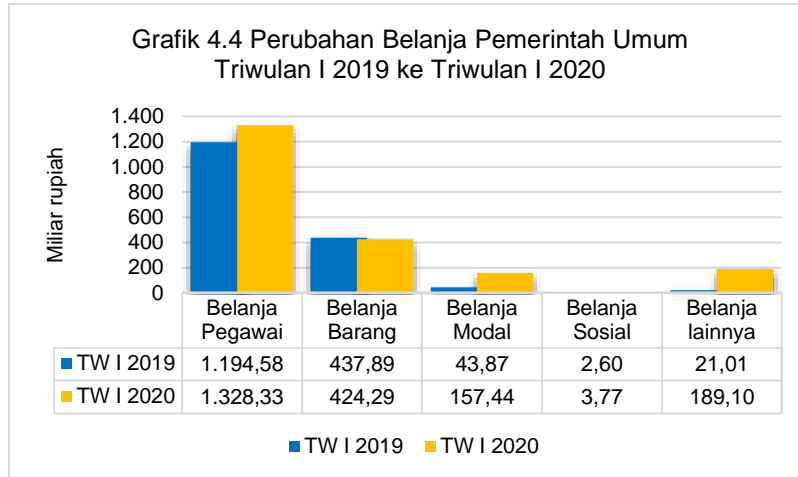
Pada triwulan I 2020 porsi belanja pegawai sebesar 63,17 persen mengalami penurunan 7,11 persen apabila dibandingkan dengan triwulan I 2019. Begitu juga dengan porsi belanja barang yang turun 5,58 persen dari 25,76 persen pada triwulan I 2019 menjadi 20,18 persen pada triwulan I 2020. Sementara porsi Belanja Modal meningkat 4,91 persen dari 2,58 persen pada triwulan I 2019 menjadi 7,49 persen pada triwulan I 2020.



Pertumbuhan porsi Belanja Modalebih tinggi daripada Belanja Pegawai dan Belanja Barang

Turunnya porsi belanja pegawai dan belanja barang pada triwulan I 2020 disebabkan oleh realisasi Belanja Modal yang meningkat 258,90 persen akibat adanya percepatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terutama di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.

2. Analisis Perubahan



Belanja Pemerintah Konsolidasian secara agregat pada triwulan I 2020 meningkat 23,71 persen dibandingkan dengan triwulan I 2019. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh Belanja pegawai yang mengalami kenaikan

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Sosial mengalami pertumbuhan sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan

11,20 persen, belanja modal mengalami kenaikan 258,90 persen dan belanja sosial mengalami kenaikan 45,05 persen. Sementara Belanja barang mengalami penurunan 3,11 persen. Kenaikan Belanja pegawai disumbangkan oleh belanja pegawai pada pemerintah daerah yang meningkat 18,31 persen yang disebabkan oleh kenaikan gaji pokok akibat penerimaan pegawai baru. Kenaikan belanja modal disebabkan oleh percepatan pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja barang mengalami penurunan disebabkan oleh belanja barang pada pemerintah pusat sementara pada pemerintah daerah mengalami peningkatan akibat adanya persiapan pilkada yang direncanakan pada akhir 2020.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Keterangan	Triwulan I 2019	Triwulan I 2020
Belanja Konsolidasian	1.771.073.752.449	2.143.195.529.966
Jumlah Penduduk Bengkulu	1.991.800	2.019.800
Rasio Belanja Negara terhadap Jumlah Penduduk	889.183	1.061.093

sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan BPS

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan I 2020 sebesar Rp1.061.093,- lebih tinggi dari triwulan I 2019 yang sebesar Rp889.183,-. Semakin naiknya rasio ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk di Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh akselerasi

Penduduk Bengkulu menikmati belanja yang lebih tinggi

belanja pada triwulan I 2020 yang lebih baik daripada triwulan I 2019. Diharapkan dengan meningkatnya rasio belanja ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional, dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB. Berikut disajikan Laporan Operasional konsolidasian sampai dengan triwulan I 2020.

	Triwulan I 2020	PDRB Triwulan I 2020	%
Revenue	3.694.262.979.153,60	18.466.480.000.000,00	20,01%
Expenses	2.254.131.190.677,00		12,21%
Gross operating balance	1.440.131.788.476,60		7,80%
Net acquisition of non financial assets	151.741.086.794,70		0,82%
Net lending/borrowing	1.288.351.784.181,90		6,98%
Net acquisition of financial assets	1.288.351.784.181,90		6,98%
Net incurrence liabilities	-		0,00%

sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan BPS

Net lending/borrowing terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 6,98 Persen, artinya pendapatan yang diterima di Bengkulu pada triwulan I 2020 mampu membiayai seluruh belanja. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak pusat dan transfer pemerintah pusat untuk menutup belanja.

Apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus perbandingan dengan PDRB maka kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 12,21 persen menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Bengkulu menjadi stimulus fiskal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD yang proposional diperlukan untuk memberikan efek multiplier dan akhirnya mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

Perbandingan *net acquisition of financial assets* dibagi dengan PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 6,98 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pada triwulan I 2020 berkontribusi 6,98 Persen terhadap PDRB. Meningkatnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan I 2020 belanja modal mulai direalisasikan dengan adanya percepatan pengadaan barang dan jasa baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Belanja Pemerintah dan Investasi Pemerintah berkontribusi masing-masing 12,21 persen dan 6,98 persen terhadap PDRB



BAB V

KONTRIBUSI APBN DAN PERAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Dunia saat ini dihadapkan dengan permasalahan pandemi yang cukup serius. Wabah COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang telah menyebar ke 213

negara, salah satunya Indonesia. Virus Corona ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Penularan virus yang begitu cepat mengancam keselamatan jiwa masyarakat, hingga pemerintah di berbagai belahan dunia yang terdampak



oleh virus tersebut menerapkan berbagai kebijakan untuk upaya pencegahan serta penanganan penyebaran virus Corona. Dampak dari adanya penyebaran virus Corona ini tidak hanya pada kesehatan, namun juga ketidakstabilan ekonomi yang merugikan di hampir seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak oleh pandemi Covid-19 juga melakukan upaya penanggulangan dengan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* atau 'pembatasan sosial' agar dampaknya tidak semakin meluas. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan yang lebih memfokuskan pada usaha untuk pencegahan serta penanganan penyebaran virus Corona.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan beberapa kebijakan diantaranya dengan membuat Program Bantuan Sosial pemerintah untuk redam dampak wabah Covid-19



Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakat agar melakukan *social distancing* agar Covid-19 tidak semakin meluas



bagi masyarakat. Program Bantuan Sosial tersebut antara lain anggaran perlindungan sosial diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) yang naik dari 9,2 juta keluarga penerima menjadi 10 juta keluarga penerima, Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima dengan manfaat sebesar Rp 200.000/bulan, Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta pekerja dan pelaku UMKM yang terkena dampak wabah Covid-19 serta 400 ribu pekerja yang ter-PHK bekerjasama dengan BPJS-TK, 30% alokasi Dana Desa difokuskan untuk memberi Bantuan Sosial kepada 5,8 juta penduduk yang berada dalam garis kemiskinan, dan pembebasan tarif listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik rumah tangga 450VA dan diskon sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900VA bersubsidi.

Guna menekan angka penyebaran pandemi Corona, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyalurkan bansos seperti anggaran perlindungan sosial untuk keluarga penerima manfaat PKH dan kartu sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Program Bansos tersebut merupakan program yang berasal dari dana APBN yang kemudian ditambah kuota penerima serta jumlah transfernya untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Corona. Penambahan kuota serta jumlah transfer bansos tersebut merupakan usulan dari Gubernur Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Pusat untuk menjaga kestabilan sosial masyarakat yang dinilai sangat rentan selama pandemi Virus Corona berlangsung.

Selain melalui dana APBN, penyaluran Dana Desa juga diprioritaskan untuk kegiatan bansos dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat Covid-19. Bansos yang dianggarkan melalui Dana Desa ini, nantinya akan disalurkan kepada KK non PKH, KK non Program Sembako, serta KK non Prakerja dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600.000. Gubernur mengingatkan agar Bupati dan Walikota segera tetapkan penerima BLT Dana Desa agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dia juga menghimbau perlunya pendampingan oleh Pemda terkait bantuan tersebut agar optimal dalam realisasinya dan tepat sasaran.



Selain APBN, Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19

